



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. M. Darwin, M.T.**
Jabatan : **Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E.,M.M**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E.,M.M

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau**



**Drs. M. Darwin, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197303301993021001**

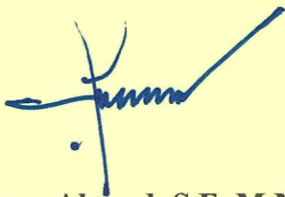
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100%
		Rasio elektrifikasi rumah tangga	98,80%
		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	15,42%
3	Meningkatnya memanfaatkan air tanah yang berkelanjutan	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	81,82%
4	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	45%
5	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	228,60 Miliar Rupiah
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 463.120.310,00,-	APBD
2. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 16.434.494.500,-	APBD
3. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 139.540.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 1.144.618.300,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.515.946.247,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E.,M.M

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. M. Darwin, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197303301993021001